# BAB IV

# GAMBARAN UMUM

## A. Sejarah Kabupaten Bogor

Untuk mengungkap sejarah Kabupaten Bogor tidak terlepas kaitannya dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di tanah Pasundan, khususnya Kerajaan Pajajaran yang mempunyai pusat kekuasaan di Bogor. Secara historis bekas kerajaan ini telah banyak mewarnai lahirnya Kabupaten Bogor. Bekas kerajaan-kerajaan ini telah banyak meningggalkan bukti-bukti sejarah berupa prasasti, diantaranya Prasasti Batu Tulis Ciaruteun yang merupakan peninggalan Raja Taruma Negara Purnawarman, yang terletak di tepi sungai Ciaruteun desa dan kecamatan Ciampea.

Kaitan kerajaan-kerajaan ini juga dapat dihubungkan dengan hari jadinya Bogor tanggal 3 Juni, yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara Kedabhakti. Dari peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bogor melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Bogor 26 Mei 1972.

Terdapat berbagai pendapat berkaitan dengan lahirnya nama Bogor. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang mempunyai arti sapi, yang secara kebetulan juga patung

sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas mempunyai dasar dan alasan tersendiri yang diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis *Hoofd Van De Negorij* Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen terebut diketahui bahwa kepala kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya. Di mana Kebun Raya Bogor itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Sejarah wilayah Bogor tidak bias dilepaskan pula dari masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff, yang berkuasa selama tahun 1743 sampai dengan 1750. Pada tahun 1744 gubernur ini meninjau kampung baru, yaitu sebuah wilayah bekas Kerajaan Pajajaran yang terletak di hulu Batavia (sekarang Jakarta). Ia merencanakan untuk membangun wilayah tersebut sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal.

Setahun kemudian Van Imhoff, menggabungkan sembilan distrik, yaitu Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Darmaga dan Kampung Baru ke dalam satu pemerintahan yang disebut dengan *Regentschap* Kampung Baru *Buitenzorg*. Kesatuan inilah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor.

Di kawasan inilah Van Imhoff kemudian membangun sebuah istana Gubernur Jenderal. Sedangkan nama *Buitenzorg*, yang artinya terlepas dari

kesulitan sebetulnya berasal dari sebuah nama bagunan sederhana yang didirikan oleh Van Imhoff di lokasi istana tersebut. Dalam perkembangan berikutnya nama *Buitenzorg* dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, Puncak Gunung Salak dan Puncak Gunung Gede, yang memang merupakan tempat ideal untuk beristirahat. Tidak diketahui dengan pasti apakah nama *Buitenzorg* ini menjadi asal usul dari nama Bogor.

Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Deandels yang berkuasa pada tahun 1808 sampai dengan 1811 dan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 sampai dengan 1816, istana Bogor itu diperbaiki. Raffles bahkan kemudian mempercantiknya dengan taman dan kawanan rusanya, serta sebuah Kebun Raya seluas 85 hektar. Dia pulalah yang kemudian menulis *The History of Java*, yang bahan-bahannnya dikumpulkannya sendiri ketika berkunjung ke berbagai tempat bersejarah di Sumatera, Jawa, Bali dan beberapa pulau lain di Indonesia. Dikisahkan pula bahwa Raffles pada waktu menulis buku ini di Cisarua.

Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor semula masih berada di dalam wilayah Kabupatenmadya Bogor. Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1982, ibuKabupaten Kabupaten Bogor ditetapkan di Cibinong dan sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan Cibinong. Rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan yang

berkedudukan di desa Tengah Cibinong ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bogor pada saat itu yang dijabat oleh Kolonel Czi Soedradjat Nataatmadja.

Pada tahun 1989, secara bertahap mulai dilaksanakan pemindahan Kantor Dinas/Instansi/Lembaga/Bagian dari wilayah Kabupatenmadya Bogor ke lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di desa Tengah Cibinong. Kabupaten Bogor ini telah dipimpin oleh 16 orang Bupati dengan diawali oleh Bupati R.A.A Surjadjajanegara pada yang berkuasa dari tahun 1939 sampai dengan 1946. Sedangkan Bupati Kabupaten Bogor yang menjabat saat ini adalah yang ke-16, yaitu Agus Utara Effendi, Sip.

Untuk mengenal dan mengetahui keberadaan Kabupaten Bogor, perlu kiranya mengenali potensi-potensi yang dimiliki, dengan mempunyai ciri khas sebagai berikut :

a. Potensi seni dan budaya, ciri khas yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor di bidang seni budaya merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Sektor Kepariwisataan, antara lain Seni Topeng Cisalak, Kliningan, Pencak Silat Cimande dan Wayang Golek.
b. Potensi masyarakat, ciri khas masyarakat yang terkenal dengan falsafah hidupnya, yaitu Heuras Congor, Heuras Genggerong, yang artinya bahwa masyarakat Bogor adalah kuat dan kokohnya sikap (pengkuh) terhadap segala aturan dan ketentuan hidup yang dipakai para leluhur terdahulu

(Heuras Congor). Sehingga barang siapa yang mencoba untuk melanggarnya, masyarakat Bogor akan bangkit untuk menindaknya. Serta Heuras Genggerong yang artinya bahwa masyarakat Bogor memiliki sifat terbuka (balaka) yang mengandung makna tidak suka berbohong atau dengan kata lain jujur bicara seadanya.

Dengan dilandasi oleh falsafah hidup peninggalan para leluhurnya di samping falsafah hidup yang secara universal dipedomani oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan agama, maka masyarakat Bogor memiliki karakteristik dalam kehidupan sehari-harinya, seperti masih kuatnya tradisi (Potret Kabupaten Bogor, 2003).

## B. Letak Fisik Wilayah Kabupaten Bogor

Secara geografis Kabupaten Bogor sebagian besar wailayahnya berada pada dataran rendah di utara pulau Jawa, sebagian kecil terletak pada dataran tinggi. Luas wilayahnya 334.378 hektar atau 3.342,78 $km^2$, yang terletak antara 6°19’ sampai dengan 6°47’ lintang selatan dan 10°621’ sampai dengan 107°13’ bujur timur. Secara administrasi terdiri dari enam Pembantu Bupati Wilayah, 30 Kecamatan, lima Perwakilan Kecamatan, 416 Desa dan sembilan kelurahan. Sedangkan batas-batas administrasinya adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Depok.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berkisar antara 15 meter pada dataran di bagian utara sampai dengan 2.500 meter pada puncak-puncak gunung di bagian selatan. Sedangkan iklimnya tropis tipe A atau sangat basah di bagian selatan dan tipe B atau basah di bagian utara. Suhu rata-rata antara 2.500 mm sampai dengan 5.000 mm pertahun.

Salah satu keunikan wilayah Kabupaten Bogor adalah tidak memiliki lautan. Namun demikian wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai dari daerah pegunungan di bagian selatan ke arah utara yang meliputi enam daerah aliran sungai (DAS), yaitu Cidurian, Cimanceuri, Ciliwung, Bekasi, Cisadane dan Citarum, khususnya Cipamingkis dan Cibeet. (Potret Kabupaten Bogor, 2003).

## C. Kebijaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor

Dengan berpedoman kepada pola dasar pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Repelita dan Rencana Umum Pembangunan Daerah,

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kebijaksanaan strategis, yaitu sebagai berikut :

a. Peningkatan mutu dan daya guna sumber daya manusia (SDM).
b. Peningkatan, perluasan dan pendalaman kegiatan ekonomi serta peluang kerja baik antar sektor pembangunan maupun antar wilayah.
c. Pembangunan antara bagian wilayah dan antar kelompok masyarakat yang lebih seimbang.
d. Penataan dan pendayagunaan kelembagaan serta sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
e. Pelestarian dan penyeimbang sumber daya alam serta lingkungan hidup.
f. Penataan penguasaan lahan yang berstatus bekas HGU dan tanah-tanah Negara lainnya yang tidak jelas penggarapannya.

Berkaitan dengan kebijaksanaan strategis, maka pola pembangunan daerah Kabupaten Bogor diarahkan ke Bogor Timur, Tengah, Barat. Hal ini dialokasikan dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya ke dalam 20 sektor pembangunan. Penataan ruang pada pembangunan lima tahun ke enam daerah yang diarahkan pada pemantapan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dicapai pada pembangunan jangka panjang pertama.

a. Kawasan lindung, secara umum dilakukan pemantapan kawasan lindung yang berfungsi baik untuk wilayah Kabupaten Bogor sendiri maupun

untuk wilayah yang lebih luas. Sehubungan dengan itau, maka kebijaksanaan yang terkait dengan kawasan lindung ini mencakup :

1) Kawasan hutan yang telah ditetapkan perlu dipertahankan keberadaannya. Pada beberapa bagian kawasan hutan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengambalikan fungsi hutan dengan vegetasi yang sesuai dalam bentuk penanaman kembali atau reboisasi dan rehabilitasi.
2) Di samping itu perlu diidentifikasi dan dilakukan penelitian lokasi secara pasti bagi kawasan-kawasan lainnya yang berfungsi lindung, seperti :
   a) Kawasan perlindungan setempat seperti sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.
   b) Kawasan suaka alam dan cagar alam.
   c) Kawasan rawan bencana alam.
3) Guna mendukung fungsi hidro-orologis wilayah, maka keberadaan situ/danau buatan perlu dipertahankan dan untuk yang telah menurun fungsinya perlu dilakukan rehabilitasi atau peningkatan.

b. Kawasan pengembangan pertanian, kawasan ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitasnya. Kebijaksanaan yang diambil mencakup sebagai berikut :

1) Mempertahankan areal lahan sawah beririgasi teknis yang ada.

2) Menambah, memperluas dan meningkatkan lahan pertanian beririgasi berskala kecil dan pedesaan pada kawasan-kawasan yang memungkinkan untuk itu.
3) Mendayagunakan lahan kering secara optimal, termasuk lahan-lahan pertanian yang belum dimanfaatkan dan kurang produktif dewasa ini.
4) Mempertahankan dan mengefektifkan pemanfaatan kawasan budidaya khususnya, meliputi perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutang produksi terbatas sebagai kawasan penyangga.
5) Pergeseran atau mutasi penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian diprioritaskan pada lahan-lahan yang tidak produktif.

c. Kawasan pengembangan pariwisata, kebijaksanaan yang terkait dengan kawasan ini meliputi antara lain :
1) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan kawasan pariwisata yang telah berkembang dewasa ini dengan penekanan pada kegiatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
2) Pengembangan kawasan-kawasan pariwisata baru terutama di bagian barat dan timur wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada serta memperhatikan keserasiannya dengan kelestarian lingkungan dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana baru (terutama jaringan jalan).

d. Kawasan pengambangan industri, kebijaksanaan yang diambil antara lain:

1) Pemantapan zona industri yang telah berkembang pada koridor bagian tengah wilayah dengan penekanan pada pencegahan dampak yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan, terutama dengan dikembangkannya instalasi pengolahan limbah. Pengembangan industri selanjutnya adalah industri yang non-polutif.
2) Pengembangan industri agro serta industri kecil dan kerajinan rakyat atau rumah tangga di luar zona industri yang telah berkembang, terutama pada pusat-pusat di bagian barat dan timur wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

e. Kawasan pertambangan atau penggalian, kebijaksanaan yang terkait dengan kawasan ini antara lain :
1) Penetapan lokasi dan pemantapan kawasan pengusahaan penggalian bahan galian golongan C dengan peningkatan inventarisasi dan pemetaan kawasan penggalian golongan C tersebut.
2) Mengurangi dampak lingkungan sebagai akibat penggalian bahan galian golongan C tersebut yang berupa lahan kritis ataupun gangguan lingkungan lainnya.

f. Kawasan pengembangan sistem pertokoan dan pusat-pusat pemukiman, kebijaksanaan yang berkaitan dengan kawasan ini meliputi :
1) Pengembangan Kabupaten-Kabupaten yang dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah di bagian barat dan timur wilayah. Pusat-pusat

yang potensial untuk itu masing-masing di bagian barat adalah Leuwiliang, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo dan Rumpin, sementara di bagian timur adalah Jonggol dan Cariu.

2) Melanjutkan pengembangan Kabupaten Cibinong sebagai pusat administrasi pemerintahan yang seklaigus diharapkan menjadi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi wilayah.
3) Sejalan dengan pengembangan Kabupaten-Kabupaten tersebut adalah pengembangan pusat-pusat pemukiman yang akan menampung baik kebutuhan internal yang tumbuh maupun luberan dari luar wilayah.
4) Perlunya pengendalian pusat-pusat pemukiman yang berkembang di bagian tengah wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
5) Pengembangan dan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana Kabupaten yang meliputi jalan, air bersih, listrik, perumahan, persampahan dan lain-lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten.

g. Kawasan pengembangan transportasi wilayah, kebijaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

1) Sehubungan dengan pengembangan kawasan-kawasan pusat produksi di atas, maka perlu dukungan sistem transportasi wilayah yang akan

menghubungkan kawasan-kawasan tersebut dengan pusat-pusat pemasaran yang ada, baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah.

2) Dengan demikian pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk dapat mendorong perkembangan pusat-pusat dan kawasan di bagian barat dan timur wilayah, baik dalam bentuk peningkatan terhadap sistem transportasi yang ada maupun pengembangan baru atau tambahan.
3) Selain itu mengingat pesatnya perkembangan kegiatan di bagian tengah wilayah perlu diidentifikasi dan diteliti untuk kemudian ditingkatkan atau dibangun sistem transportasi yang dapat mendukung pergerakkan orang dan barang.
4) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah tersebut akan mencakup transportasi jalan raya dan kereta api yang akan memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal wilayah.

Dalam konteks pembangunan regional Jabotabek, Kabupaten Bogor berfungsi sebagai :

1) Daerah penyangga DKI Jakarta sebagai IbuKabupaten Negara RI. Dengan berpedoman dan mengacu kepada tataruang yang ada, wilayah Kabupaten Bogor telah dialokasikan pembentukkan ruangnya, baik untuk lokasi budidaya dan non budidaya. Pada lahan budidaya diperbolehkan terdapat bangunan (perumahan, industri dan produk pertanian), sedangkan pada

lokasi non budidaya tidak diperkenankan adanya bangunan. Atas dasar itulah maka pada lokasi budidaya dapat dilaksanakan pembangunan yang dikaitkan dengan fungsi sebagai daerah penyangga seperti :

a) Pemukiman di wilayah Kabupaten Bogor telah dialokasikan ruang/lokasi baik untuk pemukiman berskala besar, menengah, kecil yang tersebar di beberapa kecamatan berbatasan dengan DKI Jakarta.
b) Dengan adanya lokasi pemukiman baru terdapat beberapa dampak positif maupun negatif.
c) Perindustrian sebagaimana pemukiman untuk kegiatan industripun telah dialokasikan ruang di beberapa kecamatan.

Hal yang cukup menonjol dari perkembangan industri ditandai dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bogor, khususnya di sektor industri sehingga mempercepat Laju Perkembangan Ekonomi setiap tahunnya meskipun diakui terdapat dampak negatif dari industrialisasi berupa pencemaran dan terdapat pola pergeseran sosial budaya masyarakat.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, Kabupaten Bogor mempunyai beban yang cukup berat sehingga berbagai upaya peningkatan ketahanan dalam berbagai bidang terus dilakukan untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan yang mantap serta terkendali. Untuk pemukiman di mana kepada para pemegang atau *developer* diarahkan agar dalam melaksanakan pembangunan mengacu

kepada Rencana Umum dan Tata Ruang (RUTR). RUTR serta dikendalikan dengan *site plan* dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Kemudian untuk industri pembangunannya disesuaikan dengan RUTR dan *site plan*, IMB industri non polutif dan mempergunakan tenaga kerja lokal. Setiap pembangunan, baik pemukiman maupun industri harus berwawasan lingkungan.

2) Pusat pengembangan pertanian, khususnya hortikultura dengan memanfaatkan sumber daya alam letak geografis Kabupaten Bogor dan peluang pasar Jakarta. Sesuai potensi yang dimilikinya di beberapa kecamatan telah dikembangkan komoditi unggulan berupa buah-buahan dan sayur-sayuran.

3) Daerah konservasi air dan tanah, sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Bogor terdapat 122 situ dan enam daerah aliran sungai (DAS) yang langsung berpengaruh kepada DKI Jakarta baik dalam penyediaan/suplai air maupun dalam kelestarian alam lingkungan, khususnya DAS Ciliwung yang berhulu di Kabupaten Bogor dan bermuara di DKI Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, maka langkah yang harus diambil antara lain pengendalian fungsi situ sebagai penampungan dan peresapan air melalui upaya rehabilitasi, pengaman areal situ, pembersihan dari gulma serta membuat situ buatan. Penanganan konservasi tanah dan air dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :

a) Penertiban tanah di lereng-lereng gunung yang curam.

b) Pembuatan terrasering sejajar kontur.

c) Pembuatan sumur serapan.

d) Pengendalian pemantauan lahan (BCR).

e) Penanganan dan pencegahan pencemaran sungai melalui Prokasih (Program Kali Bersih) terpadu.

f) Penghijauan pada lahan hulu DAS khususnya DAS Ciliwung.

g) Penertiban bangunan pada lahan bantaran sungai.

Dengan menyadari begitu besarnya tanggung jawab yang dipikul wilayah Kabupaten Bogor dalam konteks regional Jabotabek tersebut, mempunyai dampak di satu sisi adalah pesatnya perkembangan kawasan perKabupatenan yang terdapat dikawasan-kawasan yang berbatasan atau berdekatan dengan DKI Jakarta dan sekitarnya serta pada koridor yang menghubungkan kedua Kabupaten tersebut. Kegiatan perKabupatenan yang terdapat pada kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan industri, pemukiman dan pariwisata (Potret Kabupaten Bogor, 2003) .

## D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Serta Kondisi Umum Pegawai

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II,

pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1990. sedangkan susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1990.

**1. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1990 adalah :

> "melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati dalam rangka menghimpun dan mengelola Pendapatan Daerah bagi kepentingan pembangunan Daerah"

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dari wajib pajak.
d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.
f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya.
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan asli Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.
i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

   1). Urusan Umum

   2). Urusan Kepegawaian

   3). Urusan Keuangan

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :

   1). Sub Seksi Pendaftaran

   2). Sub Seksi Pendataan

   3). Sub Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi

d. Seksi Penetapan, terdiri dari :

   1). Sub Seksi Perhitungan

   2). Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

   3). Sub Seksi Angsuran

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :

   1). Sub Seksi Pembukuan Penerimaan

   2). Sub Seksi Pembukuan Persediaan

   3). Sub Seksi Pelaporan

f. Seksi Penagihan, terdiri dari :

   1). Sub Seksi Penagihan

   2). Sub Seksi Keberatan

   3). Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

g. Unit Penyuluhan

h. Cabang Dinas

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1990, maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor di bidang perpajakan daerah secara berurutan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pendaftaran dan Pendataan Subyek dan Obyek Pajak.

b. Penetapan besarnya pajak terhutang.

c. Penatausahaan Subyek dan Obyek Pajak.

d. Pembukuan dan pelaporan penerimaan.

e. Penagihan.

f. Penyuluhan/sosialisasi bidang perpajakan.

Secara organisatoris, kewenangan-kewenangan di atas telah didistribusikan ke dalam struktur organisasi, dengan pembagian fungsi dan tugas pokok pada setiap seksi, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1990.

## 2. Kondisi Umum Pegawai

**Tabel 3 Komposisi Pegawai Dispenda Kabupaten Bogor Menurut Tingkat dan Jenis Pendidikan**

| No. | Tingkat dan Jenis Pendidikan | Jumlah (Orang) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | **2** | **2,25** |
| 2. | Sarjana (S1) | 15 | 16,85 |
| | a. Ekonomi/akuntansi | 2 | 2,25 |
| | b. Ekonomi/manajemen | 4 | 4,49 |
| | c. Hukum | 2 | 2,25 |
| | d. Adm. Negara | 5 | 5,62 |
| | e. Adm. Niaga | 0 | 0 |
| | f. Lain-lain | 2 | 2,25 |
| 3. | Sarjana Muda (D III) | **5** | **5,62** |
| | a. Akuntansi | 2 | 2,25 |
| | b. Lain-lain | 3 | 3,37 |
| 4. | SLTA | **42** | **47,19** |
| | a. SMEA | 5 | 5,62 |
| | b. SMA | 35 | 39,33 |
| | c. Lain-lain | 2 | 2,25 |
| 5. | SLTP | **15** | **16,85** |
| 6. | Sekolah Dasar (SD/SR) | **10** | **11,24** |
| | **Jumlah** | **89** | **100,00** |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2005

Untuk melihat kondisi pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor maka berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan yang menjadi latar belakang pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel di atas ini.

Selanjutnya untuk melihat komposisi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.berikut di bawah ini :

**Tabel 4 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Umur**

| No | Kelompok Umur (Tahun) | Jumlah | Prosentase |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-29 | 17 | 19,10 |
| 2 | 30-39 | 25 | 28,09 |
| 3 | 40-49 | 32 | 35,96 |
| 4 | 50 > | 15 | 16,96 |
| | Jumlah | 89 | 100 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2005

Tabel berikut di bawah ini menyajikan pembagian pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang terdiri dari Kursus Keuangan Daerah, Kursus Pendapatan Daerah Tipe B, Kursus Pendapatan Daerah Tipe C, Kursus Manual Pendapatan Daerah (Mapatda), Diklat Perencanaan Peningkatan Pendapatan Daerah (Retikatpatda), Diklat Jurusita, Upgrading dan Kursus Bendahara Daerah seperti tergambar pada tabel 5 berikut di bawah ini :

**Tabel 5 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis**

| No | Jenis Pelatihan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kursus Keuangan Daerah | 3 |
| 2 | Kursus Pendapatan Daerah Tipe B | 1 |
| 3 | Kursus Pendapatan Daerah Tipe C | 4 |
| 4 | Kursus Manual Pendapatan Daerah | 6 |
| 5 | Diklat Retikatpatda | 3 |
| 6 | Diklat Jurusita | 3 |
| 7 | Upgrading | 1 |
| 8 | Kursus Bendahara Daerah | 1 |
| | Jumlah | 25 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2005

Sedangkan tabel di bawah berikut ini menyajikan komposisi pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan sebagai syarat untuk mencapai jenjang pangkat yang lebih tinggi. Sedangkan pada tabel berikutnya yaitu tabel 7 menyajikan distribusi pegawai berdasarkan unit kegiatan masing-masing.

**Tabel 6 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

| No | Jenjang Diklat | Eselon | Jumlah Eselon | Yang telah ikut Diklat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUM | V | 14 | 17 |
| 2 | ADUMLA | IV | 5 | 0 |
| 3 | SPAMA | III | 1 | 2 |

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2005

**Tabel 7 Distribusi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Pada setiap Unit Kegiatan**

| No | Jabatan / Unit Kegiatan | Jumlah Staf |
|---|---|---|
| 1 | Sub Bagian Tata Usaha | 5 |
| 2 | Seksi Pendaftaran dan Pendataan | 13 |
| 3 | Seksi Penetapan | 4 |
| 4 | Seksi Pembukuan dan Pelaporan | 9 |
| 5 | Seksi Penagihan | 8 |
| 6 | Seksi Perencanaan dan Pengend. Ops. | 2 |
| 7 | Unit Penyuluhan | 2 |
| 8 | Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) | 10 |
| 9 | Bendaharawan Rutin | 0 |
| 10 | Bendaharawan B3 UPTD | 2 |
| 11 | Bendaharawan Khusus Penerima | 0 |
| 12 | Bendaharawan Pembangunan | 0 |
| 13 | Bendaharawan PBB | 0 |
| 14 | Bendaharawan Gaji | 0 |
| 15 | Bendaharawan Barang | 0 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2005

## E. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bogor

### 1. Perkembangan PDRB

Untuk melihat besarnya potensi penerimaan yang dapat digali pemerintah daerah yang perlu diperhatikan pertama kali adalah perkembangan kapasitas perekonomian daerah yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meningkatnya PDRB dalam kaitannya dengan penerimaan pemerintah daerah memberikan dua implikasi penting. Pertama, kenaikan PDRB akan mendorong kenaikan obyek penerimaan daerah yang dapat ditarik dari masyarakat. Kedua, kenaikan PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menempatkan perannya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat daerah.

Peran PDRB begitu penting dan erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi serta perkembangan penerimaan daerah. Perkembangan PDRB juga dikaitkan dengan potensi perekonomian daerah Kabupaten yang berhubungan dengan aktivitas penggalian sumber-sumber dana.

Untuk melihat realisasi PDRB Kabupaten Bogor selama tahun 1998 sampai dengan 2004, di bawah ini disajikan perkembangan realisasi Produk Domestik Regional Bruto menurut Harga Konstan dengan menggunakan Tahun Dasar 2000 dalam tabel berikut ini :

**Tabel 8. Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 sampai dengan 2004**

| Tahun | PDRB (jutaan rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | (jutaan rupiah) | (%) |
| 1998 | 17.426.149 | 0 | 0 |
| 1999 | 17.707.537 | 281.389 | 1,61 |
| 2000 | 18.226.545 | 519.008 | 2,93 |
| 2001 | 18.944.701 | 718.156 | 3,94 |
| 2002 | 19.782.266 | 837.565 | 4,42 |
| 2003 | 20.745.375 | 963.109 | 4,87 |
| 2004 | 21.889.577 | 1.144.202 | 5,52 |
| **Total** | 134.722.151 | 4.463.429 | 23,29 |
| **Rata-rata** | **19.246.022** | **637.633** | **3,88** |

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 8 di atas dijelaskan bahwa realisasi PDRB pada tahun 1998 realisasi PDRB memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dengan tingkat kenaikan yang fluktuatif dengan kisaran antara 1% sampai dengan 5%. Secara keseluruhan rata-rata peningkatan yang dicapai setiap tahunnya adalah sebesar 3,88% pertahun.

Untuk jelasnya perkembangan realisasi PDRB Kabupaten Bogor ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 2. Perkembangan Realisasi PDRB Kabupaten Bogor Tahun 1998 sampai dengan 2004 (dalam jutaan rupiah)**

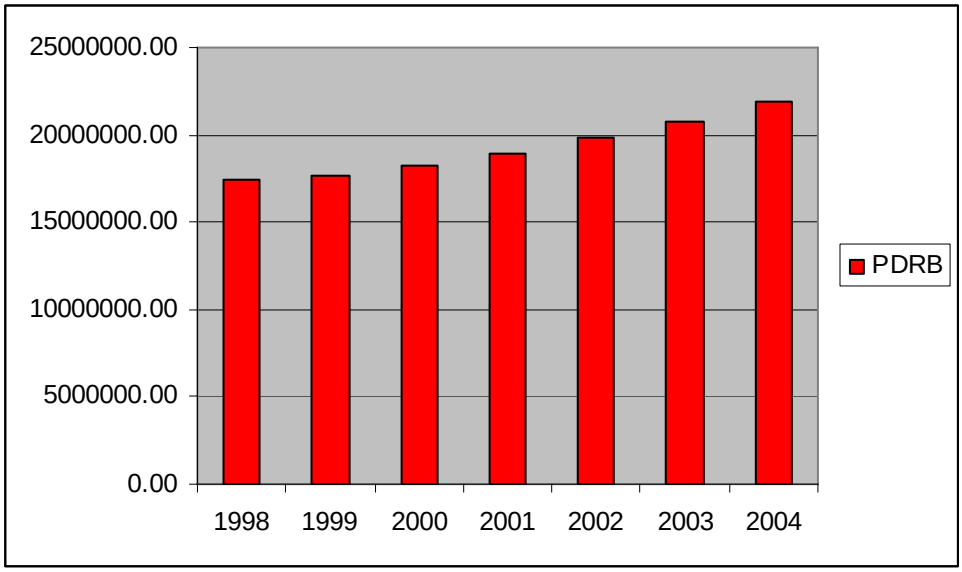


Sumber : Data diolah

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi PDRB Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat pada gambar yang menunjukan balok yang semakin meninggi sejak tahun 1998 hingga 2004. Kemudian untuk melihat realisasi PDRB dari setiap sektornya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 9. Realisasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bogor Berdasarkan Sektor Tahun 1995 sampai dengan 2004 (jutaan rupiah)**

| Sektor | Tahun | | | | | | | Jumlah | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | |
| Pertanian | 1.820.043 | 1.905.355 | 1.409.949 | 1.450.331 | 1.450.571 | 1.423.265 | 1.429.218 | 10.888.732 | 1.555.533 |
| Pertambangan dan Penggalian | 211.668 | 200.788 | 319.636 | 319.355 | 314.219 | 340.063 | 294.969 | 2.000.698 | 285.814 |
| Indiustri dan Pengolahan | 9.200.363 | 9.327.299 | 10.908.861 | 11.362.032 | 11.927.589 | 12.567.490 | 13.356.547 | 78.650.182 | 11.235.740 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | 713.021 | 744.163 | 689.226 | 717.645 | 752.535 | 791.000 | 837.825 | 5.245.414 | 749.345 |
| Bangunan | 909.569 | 887.691 | 586.424 | 612.587 | 644.563 | 681.989 | 727.576 | 5.050.400 | 721.486 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 2.077.647 | 2.104.934 | 2.812.293 | 2.910.483 | 3.037.945 | 3.189.960 | 3.376.018 | 19.509.280 | 2.787.040 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 684.388 | 690.854 | 486.619 | 511.453 | 540.192 | 575.063 | 617.289 | 4.105.857 | 586.551 |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 554.463 | 583.252 | 320.930 | 333.309 | 350.715 | 370.645 | 393.163 | 2.906.476 | 415.211 |
| Jasa-jasa | 1.254.988 | 1.263.202 | 692.606 | 727.508 | 763.936 | 805.899 | 856.973 | 6.365.111 | 909.302 |
| **Total** | **17.426.149** | **17707537** | **18.226.545** | **18.944.701** | **19.782.266** | **20.745.375** | **21889577** | **134722151** | **19.246.022** |

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa sektor industri dan pengolahan memberikan kontribusi yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Di mana kontribusi yang diberikan selama tahun 1998 sampai dengan 2004 sektor ini rata-rata sebesar Rp.11,2 trilyun per tahun. Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata sebesar Rp. 285,8 milyar- pertahunnya.

Untuk jelasnya kontribusi dari masing-masing sektor selama tahun 1998 sampai dengan 2004 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 3. Kontribusi Sektor-sektor PDRB Tahun 1998 - 2004**

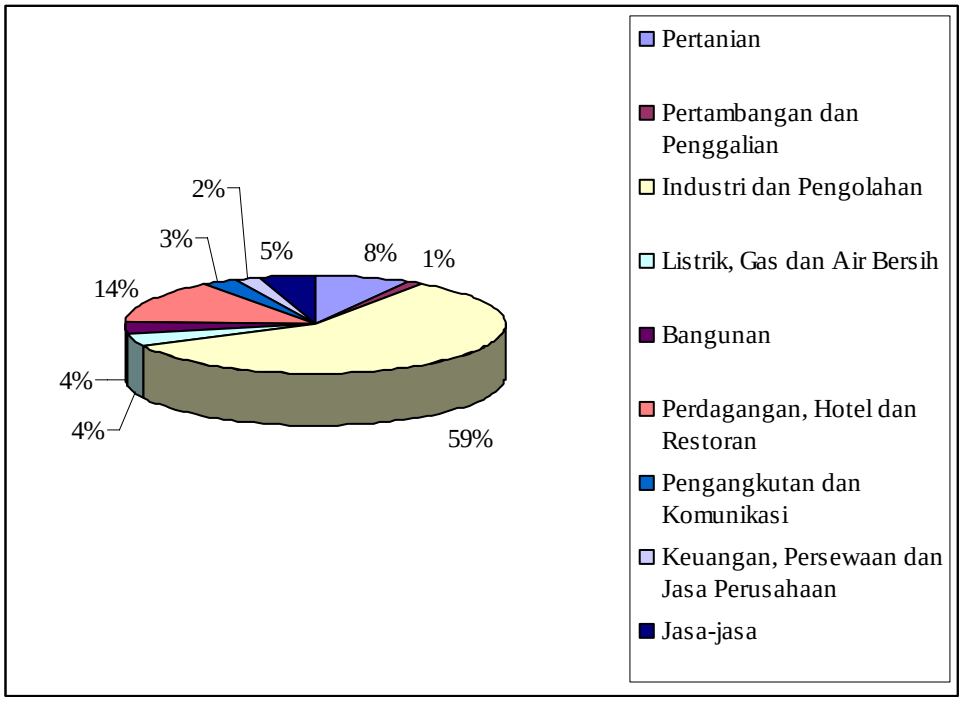


Sumber : data diolah

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa bahwa luas daerah terbesar adalah pada sektor industri dan pengolahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi terbesar diberikan oleh sektor industri dan

pengolahan terhadap realiasi penerimaan PDRB selama tahun 1998 sampai dengan 2004. Kemudian sektor yang memempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan yang terkecil kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian.

Yang perlu menjadi perhatian tentu saja bukan hanya tingkat pertumbuhannya saja, tetapi juga perlu dilihat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor internal tersebut adalah kontribusi sektoral yang membentuk PDRB. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah dan atau perkembangan makro ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Bogor.

Secara ekonomi, perkembangan PDRB Kabupaten Bogor akan sangat tergantung dari perkembangan yang dicapai oleh masing-masing sektornya. Di mana setiap daerah umumnya memiliki perbedaan kondisi untuk setiap sektor-sektor yang ada. Adakalanya suatu daerah memiliki perkembangan yang semakin pesat pada salah satu sektor. Tetapi pada daerah lain justru perkembangan yang pesat dicapai oleh sektor lainnya.

Begitu pula Kabupaten Bogor, perkembangan masing-masing sektor yang ada juga memiliki perbedaan. Di mana walaupun sektor industri dan pengolahan memiliki kontribusi yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, tetapi jika dilihat perkembangannya belum tentu menunjukkan perkembangan yang paling besar dibandingkan sektor

lainnya. Untuk melihat perkembangan masing-masing sektor PDRB selama tahun 1998 sampai dengan 2004 akan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 10 Perkembangan Sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor Tahun 1999- 2004 (jutaan rupiah)**

| Sektor | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 85.312 | -495.406 | 40.382 | 240 | -27.306 | 5.953 | -65.137 |
| Pertambangan dan Penggalian | -10.880 | 118.848 | -281 | -5.135 | 25.844 | -45.095 | 13.883 |
| Indiustri dan Pengolahan | 126.936 | 1.581.562 | 453.171 | 565.557 | 639.901 | 789.057 | 692.697 |
| Listrik, Gas dan Air Bersih | 31.142 | -54.937 | 28.419 | 34.890 | 38.465 | 46.825 | 20.801 |
| Bangunan | -21.878 | -301.267 | 26.163 | 31.976 | 37.426 | 45.587 | -30.332 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 27.287 | 707.360 | 98.189 | 127.463 | 152.015 | 186.058 | 216.395 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 6.466 | -204.235 | 24.834 | 28.740 | 34.871 | 42.226 | -11.183 |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 28.789 | -262.322 | 12.378 | 17.406 | 19.930 | 22.518 | -26.883 |
| Jasa-jasa | 8.214 | -570.596 | 34.902 | 36.428 | 41.963 | 51.074 | -66.336 |
| **Total** | **281.389** | **519.008** | **718.156** | **837.565** | **963.109** | **1.144.202** | **743.905** |
| **Rata-rata** | **31.265** | **57.668** | **79.795** | **93.063** | **107.012** | **127.134** | **82.656** |

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa selama tahun 1999 sampai dengan 2004 rata-rata mengalami penurunan. Di mana penerimaan untuk sektor pertanian kecenderungannya menurun sebesar 3,32%, sektor bangunan menurun sebesar 2,36%, sektor pengangkutan dan komunikasi menurun sebesar 0.68%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menurun sebesar 3,16% serta sektor jasa-jasa menurun sebesar 3,77%.

Kemudian untuk sektor-sektor lainnya, seperti pertambangan dan penggalian, sektor industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta Perdagangan, Hotel dan Restoran rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata perkembangan atau peningkatan yang terbesar terjadi pada perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 8,94%. Sedangkan perkembangan yang terkecil terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar sebesar 2,83%.

Sehingga jika dilihat secara umum, maka dapat dikatakan bahwa PDRB Kabupaten Bogor selama periode 1998-2004 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,43%.

**2. Perkembangan Penerimaan Daerah**

Perkembangan penerimaan pemerintah daerah menunjukkan upaya dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya. Perkembangan penerimaan daerah ini berkaitan dengan

pengeluaran pemerintah daerah yang selalu menunjukan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Dinamika pengeluaran pemerintah yang menunjukan kecenderungan meningkat ini merupakan cerminan dari meningkatnya pembangunan.

Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, maka dana yang dimobilisasi untuk penerimaan daerah harus terus dapat mengimbangi kebutuhan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah juga meliputi pembangunan keuangan daerah. Pembangunan keuangan daerah mengarah pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa.

Hal di atas dapat tercapai melalui peningkatan kemampuan keuangan uang makin handal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, melalui penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya kebijaksanaan keuangan tersebut diarahkan untuk mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis.

Di bawah ini disajikan tabel perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bogor selama periode 1998/1999–2004 yang mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif.

**Tabel 12 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998/1999 sampai dengan 2004**

| Tahun | Penerimaan Daerah | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | (Rupiah) | (%) |
| 1998/1999 | 224.082.789.854 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 339.808.929.782 | 115.726.139.927 | 51,64 |
| 2000 | 354.947.736.065 | 15.138.806.283 | 4,46 |
| 2001 | 695.808.828.637 | 340.861.092.572 | 96,03 |
| 2002 | 943.689.947.400 | 247.881.118.763 | 35,62 |
| 2003 | 843.758.485.708 | -99.931.461.692 | -10,59 |
| 2004 | 989.404.485.345 | 145.645.999.637 | 17,26 |
| **Rata-rata** | **627.357.314.684** | **127.553.615.915** | **27,78** |

Sumber : data diolah

Sumber-sumber penerimaan daerah Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan aturan perundang-undangan dari masa ke masa cukup beragam, di bawah ini dijelaskan beberapa sumber penerimaan tersebut yaitu :

**a. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya**

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau selanjutnya disebut sisa anggaran adalah sejumlah dana yang belum digunakan pada suatu tahun fiskal dan selanjutnya digunakan pada tahun berikutnya. Sisa anggaran bukan penerimaan daerah yang dihasilkan melalui pengelolaan obyek penerimaan tertentu, namun merupakan

hasil yang diperoleh dari dinamika penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa pandangan yang perlu dikemukakan dalam menilai keberadaan dana sisa anggaran tersebut. Pertama, dana sisa anggaran dianggap sebagai kegagalan pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, baik yang teralokasi dalam bentuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini terjadi bila keberadaan dana sisa anggaran disebabkan oleh realisasi pengeluaran daerah yang lebih rendah daripada yang telah direncanakan semula.

Kedua, sisa anggaran dianggap keberhasilan pemerintah daerah dalam menggalang potensi penerimaan daerah. Ini terjadi bila realisasi pengeluaran daerah sama dengan yang direncanakan atau bahkan lebih besar, tetapi masih terdapat dana sisa anggaran. Dalam hal ini dana sisa anggaran dianggap sebagai surplus penerimaan daerah.

Namun demikian, penelitian ini tidak membahas masalah pengeluaran, sehingga dalam analisis tidak akan menjadi topik yang secara khusus dibahas.

**b. Penerimaan Asli Daerah**

Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dimanfaatkannya sepenuhnya oleh daerah. Oleh karena itu perkembangannya berkaitan erat dengan upaya fiscal (*fiscal effort*) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi penerimaan yang dimiliki oleh daerah lainnya.

Di bawah ini disajikan PAD yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun dalam periode 1998/1999-2004 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 13 Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Tahun 1998/1999 - 2004**

| Tahun | PAD | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) |
| 1998/1999 | 60.391.975.854 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 67.116.468.421 | 6.724.492.567 | 11,13 |
| 2000 | 70.493.986.866 | 3.377.518.445 | 5,03 |
| 2001 | 96.338.104.088 | 25.844.117.222 | 36,66 |
| 2002 | 123.239.928.586 | 26.901.824.498 | 27,92 |
| 2003 | 146.641.203.944 | 23.401.275.358 | 18,99 |
| 2004 | 163.972.827.085 | 17.331.623.141 | 11,82 |
| **Rata-rata** | **104.027.784.978** | **14.797.264.462** | **15,94** |

Sumber : data diolah

Dalam landasan teori disebutkan bahwa PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam tabel di atas tampak bahwa selama tahun 1998/1999 sampai dengan 2004 PAD menunjukan perkembangan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Prosentase peningkatan yang terkecil terjadi pada tahun 2000, yaitu sebesar 5,03%. Hal ini diakibatkan bergesernya tahun anggaran sehingga tahun anggaran 2000 hanya terdiri dari sembilan bulan selain itu lepasnya Kota Administratif Depok menjadi Kota yang mandiri, turut mempengaruhi penurunan penerimaan asli daerah Kabupaten Bogor. Tingkat pertumbuhan berkisar antara 5,03% sampai dengan 36,66%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,94%.

Seperti telah dijelaskan pada alinea sebelumnya bahwa PAD itu sendiri terdiri dari empat unsur yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang sah, dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas penulis akan menyajikan perkembangan setiap unsur PAD tersebut. Unsur pertama yang akan dibahas adalah Pajak Daerah yang tersaji dalam tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 14. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Perkembangannya Tahun Anggaran 1998/1999 - 2004**

| Tahun | Pajak Daerah (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) |
| 1998/1999 | 25.052.914.860 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 31.615.686.894 | 6.562.772.033 | 26,20 |
| 2000 | 34.434.609.120 | 2.818.922.226 | 8,92 |
| 2001 | 47.199.523.529 | 12.764.914.409 | 37,07 |
| 2002 | 62.519.092.240 | 15.319.568.711 | 32,46 |
| 2003 | 79.234.296.204 | 16.715.203.964 | 26,74 |
| 2004 | 89.020.741.169 | 9.786.444.965 | 12,35 |
| **Rata-rata** | **52.725.266.288** | **9.138.260.901** | **20,53** |

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor secara nominal selalu meningkat. Peningkatan terkecil terjadi hanya pada tahun 2000. Hal ini diakibatkan oleh tahun anggaran yang berubah. Untuk tahun anggaran 2000 hanya terdapat 9 bulan, dengan demikian untuk perhitungan pada tahun tersebut dilakukan penyesuaian. Realisasi penerimaan pajak yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar Rp.89 milyar dan yang terendah pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar Rp.25 milyar akan tetapi secara prosentase lonjakan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 sebesar 37,07%.

Adapun unsur kedua dari PAD adalah retribusi. Realisasi penerimaan dan perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 15 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan perkembangannya Tahun Anggaran 1998/1999-2004**

| Tahun | Retribusi Daerah (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) |
| 1998/1999 | 23.142.064.662 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 26.137.398.151 | 2.995.333.489 | 12,94 |
| 2000 | 27.311.090.261 | 1.173.692.111 | 4,49 |
| 2001 | 32.915.987.078 | 5.604.896.817 | 20,52 |
| 2002 | 36.575.878.127 | 3.659.891.048 | 11,12 |
| 2003 | 44.119.053.040 | 7.543.174.914 | 20,62 |
| 2004 | 56.922.287.683 | 12.803.234.643 | 29,02 |
| **Rata-rata** | **35.303.394.143** | **4.825.746.146** | **14,10** |

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bogor tampak menunjukan peningkatan, dimana penerimaan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp.56

milyar sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 1998/1999 sebesar Rp.23 milyar. Selain itu, prosentase peningkatan yang terkecil terjadi pada tahun anggaran 2000 adalah sebesar minus 4,49%

Jenis penerimaan PAD yang lain adalah Laba Daerah dimana penerimaan dan perkembangannya akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 16 Realisasi Penerimaan Laba Daerah dan Perkembangannya Tahun Anggaran 1998/1999 - 2004**

| Tahun | Laba Daerah (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) |
| 1998/1999 | 1.820.646.604 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 503.313.255 | -1.317.333.349 | -72,36 |
| 2000 | 1.165.678.047 | 662.364.792 | 131,60 |
| 2001 | 1.992.986.766 | 827.308.719 | 70,97 |
| 2002 | 2.351.151.663 | 358.164.898 | 17,97 |
| 2003 | 3.382.316.374 | 1.031.164.710 | 43,86 |
| 2004 | 3.612.012.421 | 229.696.048 | 6,79 |
| **Rata-rata** | **2.118.300.733** | **255.909.402** | **28,41** |

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas terlihat penerimaan dari Laba Daerah berupa setoran laba BUMD terlihat sangat berfluktuatif di mana naik turunnya penerimaan terlihat tidak stabil, bahkan penurunan yang terlihat sangat drastis terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 dimana realisasi penerimaan pada tahun tersebut sebesar Rp.503 juta, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp.1,82 milyar. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan dari BUMD belum dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang handal, padahal Kabupaten Bogor termasuk daerah yang menjadi *buffer* IbuKabupaten Jakarta, artinya daerah ini sebetulnya sudah menjadi wilayah urban. Dengan demikian jika dilihat dari potensi, laba dari BUMD memungkinkan untuk menjadi unggulan

sumber penerimaan daerah, misalnya Perusahaan Daerah Air Minum, sampai saat ini, pada hampir setiap daerah adalah pemegang monopoli sebagai perusahaan penyediaan air bersih. Hal ini nampaknya tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh daerah. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa BUMD mengemban dua tujuan yaitu tujuan sosial dan bisnis.

Komponen terakhir dari PAD adalah lain-lain PAD yang sah, yang penerimaan dan perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 17 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD dan Perkembangannya Tahun Anggaran 1998/1999-2004**

| Tahun | Lain-lain PAD (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | (%) |
| 1998/1999 | 10.376.349.728 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 8.860.070.122 | -1.516.279.606 | -14,61 |
| 2000 | 7.582.609.438 | -1.277.460.684 | -14,42 |
| 2001 | 14.229.606.715 | 6.646.997.277 | 87,66 |
| 2002 | 21.793.806.556 | 7.564.199.841 | 53,16 |
| 2003 | 19.905.538.326 | -1.888.268.230 | -8,66 |
| 2004 | 14.417.785.812 | -5.487.752.514 | -27,57 |
| **Rata-rata** | **13.880.823.814** | **577.348.012** | **10,79** |

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan lain-lain PAD yang sah belum dapat dikatakan sebagai penyokong dominan dari penerimaan asli daerah. Hal ini terlihat dari tabel di atas yang memperlihatkan kontribusi yang kurang handal. Realisasi penerimaan yang ditampilkan oleh tabel di atas terlihat sangat berfluktuatif .

**c. Bagian Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi/Dana Perimbangan**

Bagian Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi/Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Subsidi Daerah Otonom, Bantuan Pembangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Penerimaan dari Propinsi.

Berikut di bawah ini disajikan tabel mengenai penerimaan dari Bagi Hasil Pajak yang diterima

**Tabel 18 Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Perkembangannya Tahun Anggaran 1998/1999 - 2004**

| Tahun | Bagi Hasil Pajak (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | (rupiah) | (%) |
| 1998/1999 | 27.015.897.000 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 43.771.688.056 | 16.755.791.056 | 62,02 |
| 2000 | 48.268.496.291 | 4.496.808.236 | 10,27 |
| 2001 | 66.409.104.882 | 18.140.608.591 | 37,58 |
| 2002 | 87.582.020.425 | 21.172.915.543 | 31,88 |
| 2003 | 111.564.051.577 | 23.982.031.152 | 27,38 |
| 2004 | 125.554.649.852 | 13.990.598.275 | 12,54 |
| **Rata-rata** | **72.880.844.012** | **14.076.964.693** | **25,95** |

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak yang diperoleh Kabupaten Bogor serta perkembangannya. Hasil tertinggi diperoleh pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar Rp. 125,55 milyar dan yang terendah pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 27 milyar. Namun secara prosentase kenaikan yang paling tinggi terlihat pada tahun anggaran 1999/2000 di mana terjadi peningkatan penerimaan lebih dari 62%.

Sedangkan untuk melihat hasil penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak, yang diperoleh Kabupaten Bogor maka penulis akan menyajikannya dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 19 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 1998/1999 – 2004**

| Tahun | Bagi Hasil Bukan Pajak (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | (rupiah) | (%) |
| 1998/1999 | 755.000.000 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 4.291.613.976 | 3.536.613.976 | 468,43 |
| 2000 | 3.859.954.955 | -431.659.021 | -10,06 |
| 2001 | 14.283.422.136 | 10.423.467.181 | 270,04 |
| 2002 | 13.158.925.148 | -1.124.496.988 | -7,87 |
| 2003 | 14.041.378.072 | 882.452.924 | 6,71 |
| 2004 | 15.802.225.559 | 1.760.847.487 | 12,54 |
| **Rata-rata** | **9.456.074.264** | **2.149.603.651** | **105,68** |

Sumber : data diolah

Selain Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Alokasi (Transfer) Dana dari pusat dikelompokkan menjadi Subsidi Daerah Otonom dan Bantuan Pembangunan yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 20 Subsidi Daerah Otonom dan Bantuan Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 1998/1999 – 2000**

| Tahun | SDO & Bantuan Pembangunan (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | (rupiah) | (%) |
| 1998/1999 | 134.948.417.000 | 0 | 0.00 |
| 1999/2000 | 209.346.159.249 | 74.397.742.249 | 55.13 |
| 2000 | 219.120.904.421 | 9.774.745.172 | 4.67 |
| **Rata-rata** | **187.805.160.224** | **28.057.495.807** | **19.93** |

Sumber : data diolah

Sedangkan sejak tahun 2001 yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keungan Pusat Daerah, yang di dalamnya diatur mengenai Dana Alokasi Umum

yang menggantikan transfer dana dari pusat ke daerah dalam bentuk SDO dan Bantuan Pembangunan. DAU yaitu dana perimbangan berupa alokasi dana (transfer) dari pusat ke daerah dalam bentuk *Block Grant* di mana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggunakan dana tersebut berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Di bawah ini diperlihatkan DAU yang diterima Kabupaten Bogor sejak tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 dalam tabel berikut ini :

**Tabel 21 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bogor TA 2001-2004**

| Tahun | SDO & Bantuan Pembangunan (rupiah) | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| | | (rupiah) | (%) |
| 2001 | 479.574.012.997 | 0 | 0 |
| 2002 | 521.753.726.174 | 42.179.713.177 | 8,80 |
| 2003 | 512.460.946.108 | -9.292.780.066 | -1,78 |
| 2004 | 591.852.182.000 | 79.391.235.892 | 15,49 |
| **Rata-rata** | **350.940.144.547** | **252.298.114.213** | **42,63** |

Sumber : data diolah